

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS DAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

Dalam penulisan skripsi berjudul “Perbandingan Strategi Perjuangan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka Pada Masa mempertahankan Kemerdekaan Dari Tahun 1945-1948”, peneliti menitikberatkan tinjauan teoritis pada konsep maupun teori perang, diplomasi dan pemikiran-pemikiran sosialisme, hal ini dikarenakan konsep maupun teori tersebut berhubungan dengan strategi yang digunakan oleh Indonesia pada masa mempertahankan kemerdekaan dari Tahun 1945-1949 yaitu strategi diplomasi dan perang. Proses diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia melahirkan beberapa perjanjian diantaranya Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar, sedangkan strategi perang berproses menjadi sebuah perang gerilya dan berpuncak pada Serangan Umum 1 Maret 1948 terhadap Kota Yogyakarta. Berikut adalah Konsep maupun Teori mengenai yang dibahas penulis, diantaranya :

##### 2.1.1 Konsep perang

1). Menurut Von Clausewitz, perang adalah tindakan kekerasan untuk membuat musuh takluk pada kehendak kita (Suryohadiprojo, 2005 : 74). Tiap-tiap negara saling mengalahkan satu sama lain demi kepentingan nasionalnya baik bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan. Contoh kasusnya ialah serangan Hitler ke Polandia Barat pada tahun 1939 untuk merebut pelabuhan Danzig dan memperluas wilayah kekuasaannya. Ini dilakukannya untuk menggabungkan wilayah Polandia yang mayoritas penduduknya

keturunan Jerman dengan negara Jerman serta menguasai pelabuhan penting di Laut Baltik yaitu Kota Danzig.

2). Sir Basil Liddle Hart menurutnya tujuan perang ialah menciptakan suatu kondisi perdamaian yang lebih baik (Mabesad, 2007: 84). Masuknya Amerika Serikat dalam Dunia II dipihak Sekutu membawa pengaruh kuat bagi kekalahan Jerman di Eropa dan Jepang di Asia-Pasifik. Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membawa kekalahan bagi pihak Jepang sehingga menyerah dan bersedia melakukan perundingan untuk mencapai perdamaian.

3). Mao Tze Tung, perang adalah kelanjutan dari politik atau diplomasi yang gagal. Sebelum berlangsung perang masing-masing pihak saling berunding untuk mencapai suatu kesepakatan, tapi terkadang kedua belah pihak tidak mau menerima hasil perundingan sebab tidak sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang sama-sama menginginkan keuntungan. Oleh sebab tidak tercapainya kesepakatan maka jalan terakhir ialah melalui unjuk kekuatan yaitu perang, misalnya Perjanjian Versailles yang hanya mampu bertahan 20 tahun, dan kemudian tidak dapat mencegah agresi Jerman ke negara sekitarnya. (Widjaja, 1992 : 51).

4). Menurut Von Bulow dalam buku *Intelligence*, (1966 : 49), perang adalah salah satu aspek dari pertikaian politik, jadi Von Bulow lebih menekankan bahwa perang adalah dampak dari pertikaian politik, seandainya pertikaian politik mereda, maka bisa dipastikan perang akan selesai. Contoh kasus adalah konflik antara Indonesia dengan Belanda pada masa mempertahankan kemerdekaan 1945-1949, yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan politik, dimana Indonesia menganggap dirinya sudah merdeka dari bentuk penjajahan dan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri sedangkan

Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia serta masih menganggap Indonesia (Hindia-Belanda) sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya. Hal inilah yang nantinya berujung pada konflik senjata antar kedua belah pihak.

### **2.1.2. Teori Perang**

#### 1). Teori Militerisme

Teori ini berpendapat bahwa perang tertentu pada umumnya tidak buruk, tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang bisa diperoleh dalam perang diantaranya ialah perang bisa digunakan sebagai alat pemersatu rakyat pada suatu negara dalam menghadapi musuh dari luar, selain itu perang mampu menggerakkan perekonomian suatu negara seperti industri pertahanan yang memproduksi persenjataan dan kendaraan tempur, pesatnya industri ini menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja sehingga menciptakan pekerjaan bagi banyak orang, misalnya perkembangan industri militer Amerika Serikat, Jerman dan Jepang saat Perang Dunia II (Hedges, 2009 : 5 ). Untuk contoh kasus Indonesia, perang mempertahankan kemerdekaan mampu menyatukan berbagai suku, agama dan golongan dalam usaha memberikan perlawanan kepada pihak musuh. Perang juga ternyata mampu memberikan keuntungan lain di meja internasional, dimana dengan berperang dunia bisa tahu bahwa Indonesia tetap berdiri dengan adanya tentara RI bersma rakyat terus memberikan perlawanan dengan bergerilya.

#### 2). Teori Sun Tzu

Sun Tzu menyatakan bahwa penggunaan militer harus diperhitungkan, jika bukan kepentingan negara jangan bertindak, militer perlu didukung oleh bantuan intelijen, serangan diam-diam dan mendadak serta teknik mengelabui lawan.

Segala kekuatan militer dikerahkan untuk kepentingan negara dan didukung oleh kekuatan militer dengan strategi yang tepat dan matang, diantaranya pengetahuan melalui kondisi, pergerakan maupun rahasia kekuatan musuh serta serangan tersembunyi yang dilakukan secara mendadak dengan harapan mampu menghancurkan pertahanan musuh. Pengetahuan mengenai kondisi dan situasi musuh akan berdampak pada penggunaan strategi perang yang digunakan, jika musuh kuat dari segi pasukan dan persenjataan akan cocok diterapkan sistem perang gerilya, dimana saat musuh menyerang kita mundur, musuh lengah kita serang (Widjaja, 1992 : 16-19).

### 3). Teori Realisme

Negara harus mengutamakan keamanan negara dan kepentingan dirinya. Keamanan negara adalah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi, ini bisa dilihat dari perlawanan Polandia terhadap agresi militer Jerman tahun 1939, Perang antar Republik China dengan Pasukan Jepang tahun 1937 di Daratan China, Penguasaan Amerika Serikat terhadap sumber minyak bumi di wilayah Timur-Tengah (Nasution, 1988 : 3 -15).

Hubungan Teori Realisme dengan skripsi peneliti, bisa dilihat dari pemikiran tokoh seperti Tan Malaka dan Militer yang menolak perundingan, sebab dianggap merugikan Indonesia. Bagi mereka kemerdekaan harus diperoleh secara penuh dengan berbagai cara termasuk peperangan.

### 4). Teori Jomini

Jomini berpendapat bahwa pemimpin militer tidak bisa menggerakkan semua pasukannya, ia harus mendapat persetujuan dari pemimpin politik. Pemimpin Politik merupakan penentu kebijakan suatu negara, dialah yang bertanggung jawab terhadap roda pemerintahan serta perekonomian maupun militer suatu negara, misalnya adalah

pernyataan perang dari Adolf Hitler, Benito Mussolini, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin. Mereka merupakan pemimpin politik yang terlibat dalam kebijakan mengenai Perang Dunia II. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>, 5 /1/ 2011).

### 2.1.3 Konsep Diplomasi

Negara adalah suatu instansi sosial yang didalamnya terdapat hubungan antar manusia dan masyarakat sehingga diantara keduanya saling membutuhkan. Berawal dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan dalam kehidupannya membutuhkan proses kerjasama yang dinamakan dengan diplomasi. Pemahaman akan masalah diplomasi sangat penting mengingat skripsi yang diangkat berhubungan dengan pemikiran Sutan Sjahrir, dimana Sjahrir berpendapat strategi diplomasi merupakan peluang bagi Indonesia dalam mendapatkan simpati dan perhatian internasional. Indonesia tidak hanya memerlukan dukungan domestik tapi dukungan dunia internasional sangat berarti untuk menekan Belanda. Beberapa contoh Konsep maupun Teori Diplomasi, diantaranya :

- 1). George F. Kennan berpendapat bahwa diplomasi merupakan bisnis berkomunikasi antar pemerintah (Frankel, 1980 : 129). Bisnis komunikasi bermakna hubungan pembicaraan antar satu pihak ke pihak lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak tersebut, misalnya perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda.

- 2). Dahlan Nasution dalam Buku *Perang atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional* menyatakan bahwa Perdamaian Internasional tidak mungkin dipelihara melalui pembatasan kedaulatan nasional dan melalui hubungan nasional semata-mata,

demikian pula perdamaian internasional melalui transformasi belum lagi dapat dicapai dalam kondisi-kondisi sosial, politik dan moral seperti sekarang.

Untuk mengatasi masalah-masalah itu, maka di samping melalui pengurangan kekuatan di antara dua negara besar itu, diperlukan suatu cara melalui apa yang disebut metode akomodasi, cara ini biasa disebut sebagai Diplomasi (Nasution, 1988 : 211).

3). Hans J Morgenthau menyatakan bahwa Diplomasi merupakan elemen kesembilan kekuatan suatu bangsa. Diplomasi merupakan faktor yang terpenting dari segala faktor-faktor yang terdahulu sebagai pembentuk kekuatan-kekuatan, karena ialah yang menyatukan faktor-faktor tersebut dalam satu kebulatan yang padu, serta membangunkan potensi terpendam dengan tindakan-tindakan nyata. Penanganan-penanganan masalah-masalah politik luar negeri suatu negara oleh diplomat-diplomatnya pada masa damai, sama nilainya terhadap *power* yang dilakukan pimpinan militer dengan strategi dan teknik peperangan. Dapat dikatakan, bahwa bila moral nasional adalah jiwa, maka diplomasi adalah otak dari kekuatan nasional (Nasution, 1988 :100).

4). Diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi seseorang yang mewakili negara maupun organisasi (<http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>, 5 /1/ 2011 ). Biasanya tiap negara atau organisasi diwakili oleh orang yang memiliki keahlian berkomunikasi untuk menjalin hubungan dengan negara maupun organisasi lain, orang ini biasa disebut Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Diplomat ataupun Seksi Humas (Hubungan Masyarakat).

#### 2.1.4. Teori Diplomasi

1). Teori *Protracted Sosial Conflict* (PSC) atau Konflik Sosial Berkepanjangan ini dikemukakan oleh Edward Azar. Teori ini menyatakan bahwa permasalahan tidak hanya ditimbulkan oleh faktor domestik tetapi faktor internasional juga berperan serta menimbulkan konflik-konflik tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak internasional dalam mengatasi suatu permasalahan di satu negara (Jemadu, 2007 : 87). Teori ini sangat mendukung kebijakan politik diplomasi Sutan Sjahrir yang berunding untuk mendapatkan simpati internasional dalam usaha memberikan tekanan kepada pihak Belanda.

2). Teori *Intergovernmentalisme* dikemukakan oleh Stanley Hoffman, Hoffman memandang bahwa politik internasional adalah interaksi antar negara-negara yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan bahwa setiap negara selalu berusaha untuk melindungi kedaulatan mereka dalam dunia anarkis tetapi tidak menutup kemungkinan kerjasama antar negara-negara berdaulat, yang memunculkan norma-norma yang mengatur perilaku internasional, dan pengaruh politik domestik terhadap kepentingan negara (Hermawan, 2007 : 158). Teori ini bisa dihubungkan dengan perundingan merupakan langkah Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya tapi perlu diingat bahwa Indonesia memerlukan kerjasama internasional untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia, sebab pengakuan internasional adalah salah satu syarat berdirinya suatu negara.

3). Teori Politik Kekuasaan (*Power Politics*) dikemukakan oleh Hans J Morgenthau, Morgenthau menyatakan bahwa apapun sistem pemerintahannya, setiap negara bertindak dengan didasari dorongan untuk perjuangan demi kekuasaan dan politik

kekuasaan adalah norma dasar di dalam aktivitas hubungan antar negara (Hadiwinata, 2007 : 11). Teori ini mampu memberikan pemahaman bagi peneliti terutama dalam mengkaji pertentangan antara Indonesia yang mati-matian mempertahankan kemerdekaan dan Belanda yang tidak rela melepaskan negara jajahannya. Kedua negara tersebut saling berusaha dan berjuang demi keuntungannya masing-masing.

#### **2.1.5. Teori Imprealisme Lenin**

Teori ini diungkapkan oleh Lenin, ia menyatakan bahwa kolonialisme merupakan perkembangan lanjutan dari kapitalisme, sengan sendirinya orang yang menolak kolonialisme, ia akan cenderung menolak kapitalisme sebagai induknya. Teori ini sangat penting bagi peneliti karena di awal abad ke 20an teori ini mampu menarik perhatian kalangan intelektual bangsa Indonesia yaitu Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, yang bercita-cita memerdekakan rakyat Indonesia dari segala macam penindasan dan penjajahan. Dalam semangat zaman itu, kapitalisme dan kolonialisme dianggap sebagai kekuatan yang cenderung melakukan eksploitasi manusia atas manusia dan akan menghasilkan kemakmuran dan kejayaan untuk para pemilik modal dan penderitaan untuk bagian terbesar orang yang berprofesi sebagai tenaga kerja (Anwar, 2002 : XXVI).

#### **2.1.6. Teori Dimitrov dan Zhdanov**

Teori yang diungkapkan oleh tokoh kominten yaitu Georgi Dimitrov, dikenal dengan nama garis Dimitrov yang berisi anjuran bahwa komunis sebaiknya bekerjasama dengan kaum kapitalis atau liberal, dengan tujuan untuk membendung pengaruh Nazisme dan Fasisme, yang berkembang di Jerman, Italia, Spanyol dan Jepang (<http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/musso/page03.php> / 3 / 7 /2011). Negara-negara itu



seperti Jerman, Italia dan Jepang mulai memperluas dan menyebarkan pengaruhnya ke berbagai negara disekitarnya, seperti Eropa, Afrika Utara dan Asia Timur Raya.

Teori ini dikemukakan oleh Andrei Alexandrovich Zhdanov pada tahun 1947, Zhdanov berpikiran bahwa Komunis harus mengambil jarak dengan kaum kapitalis-liberal, pemikiran ini tentu saja membagi dunia dalam dua blok yaitu blok barat dan blok timur. Tentu saja garis politik Zhdanov ini mengakhiri kerjasama antara pihak komunis dan kapitalis-liberal (<http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/musso/page03.php> / 3 / 7 /2011).

### **2.1.7. Teori Sosialisme**

Sosialisme adalah suatu paham yang mementingkan kepentingan umum maupun masyarakat diatas kepentingan individu atau pribadi, sosialisme lahir sebagai reaksi atas kaum kapitalis-liberal yang banyak merugikan golongan pekerja/buruh. Dibawah ini ada beberapa pokok-pokok pikiran sosialisme yang berkembang, diantaranya :

#### **a). Teori Sosialisme Marie Charle Fourir**

Marie Charle Fourir menyatakan perlunya adanya pengaturan sosial dalam masyarakat, dengan didukung oleh sistem pemilihan umum, dan sistem pendidikan yang sama bagi anak-anak tanpa membedakan yang miskin dengan yang kaya. Menurutnya pendapatan usaha, haruslah dibagi antara tenaga, kapital dan bakat, dengan bagian terbesar disediakan untuk tenaga. Teori ini menginginkan perubahan masyarakat melalui sistem politik pemilu yang bebas serta multi partai yang didukung oleh ketersediaan pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya.

#### b). Teori Sosialisme Saint Simon

Saint Simon memiliki gagasan perlunya sarana sarana produksi agar sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Sarana sarana produksi yang dikuasai digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Simon sangat menekankan campur tangan negara dalam mengelola perekonomian demi kepentingan rakyat. Sehingga monopoli ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak dapat dicegah, terutama paham kapitalis-liberalis yang memberikan kesempatan memonopoli ekonomi pada sekelompok orang. Pemerintah dalam hal ini, diharapkan mampu mendistribusikan keuntungan ekonomi yang merata ke setiap orang atau individu supaya keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai.

#### c). Teori Sosialisme Robert Owen

Robert Owen menekankan gagasan perlunya kerjasama antara pemerintah, parlemen, gereja dan rakyat, pentingnya akan pendidikan, orientasi harus lebih kepada rakyat, penyelesaian permasalahan antara kaum kapitalis dan buruh melalui perbaikan nasib seluruh masyarakat. Kerjasama yang baik antar beberapa pihak akan menghilangkan sikap otoriter bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan, hal ini dikarenakan untuk membangun kemajuan suatu bangsa juga dibutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak selain pemerintah, seperti parlemen, gereja serta organisasi masyarakat lainnya. Selain kerjasama yang baik antar berbagai pihak, juga diperlukan kepedulian tinggi terhadap pendidikan yang merata bagi penduduk dalam mebingkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup kaum buruh yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan golongan kapitalis atau pemilik modal.

#### d). Teori Sosialisme Thomas Moore

Thomas Moore berpendapat bahwa sosialisme merupakan reaksi dari kapitalisme. Sosialisme akan dapat mengembangkan diri pada negara-negara yang memiliki tradisi liberal seperti Eropa Barat sedangkan di negara yang tidak memiliki tradisi semacam itu, cenderung akan menjadi fasis. Jadi paham sosialisme dapat berjalan beriringan dengan liberal dibandingkan fasisme yang sistem politiknya cenderung diktator.

Dari beberapa kutipan teori sosialisme diatas, penulis berpandangan bahwa teori sosialisme lebih menekankan perubahan sosial secara perlahan-lahan melalui sarana pemilu, pendidikan dan perbaikan ekonomi masyarakat terutama ketimpangan sosial antara kaum kapitalis dan buruh. Aliran-aliran sosialis ini bertentangan dengan paham komunis yang menginginkan perubahan secara revolusioner, seperti perebutan kekuasaan.

#### **2.1.8. Teori Karl Marx dan Friedrich Engels**

Karl Marx berpandangan bahwa sejarah dari manusia yang ada sampai saat ini merupakan cerita dari perjuangan kelas. Kebebasan dan perbudakan, bangsawan dan kampungan, tuan dan pelayan, kepala serikat kerja dan para tukang, dengan kata lain penekan dan yang ditekan, berada pada posisi yang selalu bertentangan satu sama lainnya, dan berlangsung tanpa terputus (Syam, 2007 : 175).

Negara, menurut Marx merupakan alat dari kelas penguasa untuk menindas kelas yang dikuasai. Pemerintahan negara dapat diidentikan sebagai kelompok berkuasa yang memiliki kekuatan untuk mengatur kelas dibawahnya, sehingga negara hanya menjadi alat bagi kaum borjuis dan kapitalis. Untuk menghadapi itu semua diperlukan perjuangan

kelas proletariat untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dengan adanya masyarakat tanpa kelas, negara dengan sendirinya akan lenyap.

Menurut Engels, masyarakat dengan cepat memasuki suatu tahapan dalam perkembangan produksi dimana kelas-kelas masyarakat bukan saja tidak lagi menjadi kebutuhan, melainkan juga akan menjadi penghalang yang positif bagi produksi. Kelas-kelas itu akan runtuh sebagaimana telah lahir pada masa tahapan terdahulu. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas itu maka hilang pula negara (Syam, 2007 : 188).

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan antar kelas merupakan bagian yang tidak bisa melepaskan dari kehidupan manusia. Pergolakan sosial yang ada dikarenakan timbulnya gerakan perubahan sosial yang dilakukan kelompok tertindas kepada kelompok yang menindas. Kelompok tertindas disimbolkan oleh golongan buruh sedangkan kelompok penindas disimbolkan golongan kapitalis-liberal (borjuis).

## **2.2. Tinjauan Kepustakaan**

Dalam menyelesaikan skripsi berjudul “ Perbandingan Strategi Perjuangan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, penulis mengkaji beberapa sumber utama diantaranya :

### **2.2.1 Buku Pemikiran Tan Malaka**

Buku pertama yang berjudul “*Dari Penjara Ke Penjara* “, merupakan salah satu buku karya Tan Malaka, buku ini selesai beliau tulis pada tahun 1947 (diterbitkan ulang pada tahun 2008), ketika berada dalam penjara Ponorogo. Beliau menceritakan secara mendalam perjalanannya dari satu penjara di suatu wilayah ke penjara lainnya di wilayah berbeda, seperti penjara di Hindia-Belanda, Filipina, Hongkong. Kisah lain yang diceritakannya ialah pengembaraannya dari satu wilayah ke wilayah lain seperti Deli,

Semarang, Filipina, Kanton, Hongkong, Birma, Bayah dan lainnya. Dari buku ini, diketahui bahwa Tan Malaka sangat aktif menjalin komunikasi baik dengan organisasi pergerakan di Hindia-Belanda maupun organisasi politik di luar negeri. Sikap perjuangan Tan Malaka jelas, tetap memegang prinsip non-kooperatif. Dalam berjuang, beliau menggunakan strategi propaganda baik lisan atau tulisan, pendidikan, bantuan sosial seperti membantu korban romusha dan kaum tani di Bayah. Ungkapan menarik dari beliau dalam buku ini adalah “Siapa ingin merdeka, harus bersedia dipenjarakan....”.

Buku ini mendeskripsikan mengenai perjalanan dan pengalaman politik Tan Malaka di berbagai daerah dan negara dengan sangat jelas. Dari buku ini kita mengetahui pemikiran politiknya sudah berstandar internasional, beliau dikenal bukan hanya didalam negeri tapi juga di luar negeri, karena beliau merupakan anggota Komite Komunis Internasional. Buku ini merupakan referensi penting bagi penulis skripsi untuk menggali pokok-pokok pikiran politik serta pengalaman maupun perjalanan Tan Malaka dalam berjuang baik di Indonesia maupun luar negeri. Diharapkan setelah mengkaji buku ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai latar belakang politik dan strategi perjuangan Tan Malaka. Tan Malaka cenderung berfikir bahwa revolusioner adalah jalan terbaik menghadapi Belanda. Peneliti menggunakan Buku Dari Penjara ke Penjara disebabkan karena buku ini merupakan buku karangan Tan Malaka sendiri, keterkaitan buku ini dengan skripsi yang dibuat adalah buku ini memiliki banyak kisah maupun data yang banyak dalam menggali mengenai peristiwa-peristiwa perjuangan dari sudut pandang Tan Malaka sendiri. Dengan memahami lebih dalam buku ini, peneliti mampu menganalisis pokok-pokok pikiran revolusioner Tan Malaka, yang banyak mempengaruhi pengalaman dan pergerakan politiknya.

Peneliti menilai bahwa Tan Malaka merupakan orang yang sangat peduli terhadap masyarakat dan negaranya, cuma jalan yang ditempuhnya yaitu revolusioner anti diplomasi tidak diimbangi dengan kekuatan militer Indonesia yang masih kalah dalam segi persenjataan dibandingkan Belanda. Apalagi militer Indonesia di topang oleh berbagai kelompok berbeda mulai dari KNIL, PETA dan laskar-laskar rakyat. Seringkali diantara kelompok tersebut timbul perselisihan maupun persaingan.

Buku Kedua berjudul “ *Madilog* “, ditulis oleh Tan Malaka pada masa pendudukan Jepang mulai tahun 1942-1943, dan dicetak ulang tahun 2010 oleh penerbit Narasi. Buku ini membahas paham Materialisme, Dialektika dan Logika, ketiganya merupakan paham yang didapat oleh Tan Malaka ketika berpetualang ke Eropa. Menurut beliau paham ini bertentangan dengan paham Timur yang masih mempercayai mistik dan alam gaib. Penulisan buku ini terinspirasi oleh kondisi Romusha di Bayah, Banten. Tan Malaka saat itu bekerja sebagai Ketua Badan Pembantu Pembelaan (BPP) dan Badan Pembantu Prajurit pekerja (BP3). Buku ini dibagi beberapa Bab, yaitu Bab I berisi mengenai Logika Mistika yang mendapat tantangan dari ilmu pasti. Bab II dibahas mengenai filsafat seperti filsafat idealis Lenin Rusia, filsafat fasisme di Jerman dan Italia. Bab III Ilmu-Pengetahuan-Sains, bahwa suatu negara harus merdeka supaya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains. Selama suatu negara masih diatur, dikemudikan dan dijajah oleh bangsa lain, jangan harap bangsa tersebut mampu mengembangkan diri dan mencapai kemerdekaan. Bab IV merupakan sambungan science. Bab V membahas dialektika, yang berisi Waktu, Pertantangan, Timbal-Balik, Seluk-Beluk (pertalian), Bab VI Logika, Tan Malaka ingin mengajari masyarakat cara berpikiran rasional dan logis serta tidak mistis.

Buku ini pun menguraikan bagaimana pemikiran Tan Malaka sekembali dari pengembaraan di luar negeri terutama Eropa, yang menemukan pemikiran yang bertumpu pada akal dan perkembangan yang sedang terjadi. Pola pikir yang didapatnya ini berlawanan dengan adat tradisi Indonesia yang bertumpu pada mistik dan alam gaib. Hal ini karena kepercayaan mistik dan alam gaib tidak akan membawa kemajuan pada suatu masyarakat dan bangsa. Selain itu, peneliti berpandangan bahwa pengaruh barat yaitu ideologi serta pemikiran secara perlahan-lahan sudah meresap pada kehidupan dunia timur, seperti sikap materialisme memunculkan sikap individualisme dan kapitalisme, dialektika yaitu hubungan komunikasi intensif antara tokoh politik dan rakyat atau massa, serta logika yaitu suatu pola pikir yang menekankan cara berfikir rasional, logis, tidak mistis dengan ditunjang oleh ilmu pengetahuan.

Peneliti berpendapat buku ini mencoba memaparkan usaha dari Tan Malaka dalam mengubah pola pikir masyarakat supaya bisa berfikir kritis dalam menyingkapi kondisi sosial-politik yang dialaminya. Jika masyarakat menjadi kritis maka akan memunculkan rasa sadar akan kondisinya yang terjajah untuk kemudian bangkit melawan ketertindasan dan ketidakadilan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana usaha dari Tan Malaka dalam memadukan pemikiran barat maupun luar negeri yang diperolehnya melalui pengalaman dengan adat istiadat dan tradisi yang turun-temurun di masyarakat. Dengan memahami Buku Madilog kita akan mampu membaca pola pikir Tan Malaka beserta ideologi-ideologi yang berkembang pada masa itu. Pengetahuan ini tentu mampu menambah daya imajinasi kita akan masalah intelektual yang terjadi pada masa pergerakan nasional, terutama di Indonesia.

Buku Ketiga berjudul “ *Aksi Massa* “, dicetak pada tahun 1926, dicetak ulang tahun 2000 oleh Komunitas Bambu. Buku ini mendeskripsikan model imperialisme Belanda yang dianggap lebih kuno jika dibandingkan dengan imperialisme Inggris dan Amerika. Belanda merupakan negara yang miskin sumber daya alam (SDA), berbeda dengan Inggris dan Amerika. Sejak dulu Belanda bertopang pada pertanian dan perdagangan. Sekarang Indonesia menjadi pusat perekonomian Belanda, dimana kaum tani dan buruh tinggal di Indonesia, sedangkan banker, kaum industri dan saudagar ada di Belanda. Apalagi kaum pedagang menengah bumiputera telah dimatikan sejak lama oleh Belanda. Selain itu pendidikan intelektual tidak diperhatikan, sehingga Hindia-Belanda tidak mampu melepaskan perbudakan politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu perjuangan melalui jalur parlementer tidak akan efektif di Indonesia, sebab bagaimana mungkin kaum tani dan buruh miskin serta tidak memperoleh pendidikan bisa mewakili kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu harus dilakukan langkah revolusioner yaitu aksi massa, dari massa untuk massa melalui pemogokan, pemboikotan dan demonstrasi-demonstrasi yang mengalir terus ke jalan.

Peneliti menilai Tan Malaka berusaha mempersatukan massa dari berbagai profesi seperti petani, pedagang, nelayan, buruh dan lainnya untuk bersatu-padu dalam sebuah kekuatan maupun ideologi tertentu dibawah satu pimpinan dan komando. Pergerakan massa ini tidak terlepas dari pengalaman beliau ketika mengamati munculnya Revolusi Bolshevik di Rusia dengan pimpinan Lenin. Potensi yang kita miliki diantaranya : jumlah penduduk yang cukup besar dengan berbagai macam suku, agama, golongan dan profesi. Hal ini ditunjang oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang sengsara dan tertindas oleh penjajah Belanda dan kaum kapitalis, apalagi masalah



pendidikan, kesehatan, sosial dan sarana-prasarana bagi masyarakat tidak diperhatikan. Tentu saja hal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat pribumi dengan Pemerintah Hindia-Belanda, kaum kapitalis, warga keturunan Arab dan Tionghoa. Rendahnya kualitas sumber daya penduduk pribumi menyebabkan beliau menganggap pengerahan massa merupakan solusi tepat dalam melawan pemerintah kolonial Belanda.

Buku keempat berjudul “ *Menuju Republik Indonesia* “, pertama kali dicetak pada tahun 1925, kemudian dicetak ulang tahun 2007. Buku ini menguraikan masalah perkembangan politik dunia pasca Perang Dunia I, seperti Bab I menerangkan tentang negara-negara Sekutu mengalahkan negara Sentral, berkembangnya pergerakan non-kooperatif di dunia, berkembangnya pergerakan kaum proletar / buruh.

Bab II membahas tentang situasi politik di Indonesia, dimana pertentangan antara pemerintah Belanda dan rakyat semakin besar, jiwa revolusioner meresap deras dalam sanubari rakyat yang menyebabkan pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti di Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Sidomulyo. Rakyat Indonesia sekarang tidak bisa lagi digertak maupun ditakuti.

Bab III Tan Malaka menerangkan mengenai tujuan PKI dalam berbagai bidang, misalnya mengganti sistem kapitalisme dengan komunisme. Tujuan PKI kemudian dijabarkan dalam program, seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, militer, polisi, rencana aksi. Belum ada partai politik Indonesia yang mengumumkan begitu jauh program-programnya selain PKI. Oleh karena itu, Tan Malaka menilai PKI adalah partai yang paling siap dalam berjuang dibandingkan partai politik lainnya, sehingga wajar jika menjadi partai pelopor dan pemimpin gerakan revolusioner. Untuk mengubah suatu keadaan, tidak hanya didasarkan pada kualitas organisasi kita, tetapi keadaan ekonomi-

politik baik di dalam maupun diluar negeri. Tan Malaka juga menerangkan suatu pukulan penghabisan akan berhasil, jika partai memiliki disiplin baja, rakyat Indonesia di bawah pimpinan PKI, musuh-musuh baik dalam dan luar negeri sedang terpecah belah.

Dalam pandangan saya, pergerakan kaum buruh maupun proletar sangat pesat terutama setelah Perang Dunia I dan kemunculan Rusia sebagai negara komunis yang dengan cepat menyebarkan ideologinya di negara sekitarnya. Tumbuhnya ide sosialisme sampai komunisme tidak lain sebagai bentuk reaksi protes rakyat berwujud revolusi terhadap pemerintah sebelumnya yang dianggap bertindak sewenang-wenang terhadap kaum petani maupun kaum buruh. Ini tentu saja memberikan semangat perubahan kepada kaum petani dan buruh di Indonesia untuk bangkit melawan penjajahan. Apalagi kaum petani dan buruh Indonesia tidak lagi sendirian, tapi kaum petani dan buruh dunia akan bersatu dalam wadah Komunis Internasional.

Tan Malaka beranggapan bahwa PKI merupakan salah satu solusi politik dalam menghimpun berbagai macam aspirasi kaum petani, buruh dan tertindas. Program-program yang dijalankan PKI banyak bersentuhan serta menguntungkan kaum tersebut. Bagi PKI perubahan hanya bisa dilakukan dengan cara revolusioner, yaitu merebut kekuasaan dengan berbagai cara, kemudian setelah kekuasaan berhasil didapatkan, maka arah kebijakan politik disesuaikan dengan paham sosialisme yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas serta tanpa hisap-menghisap. Dengan cara itu diharapkan terjadinya pemerataan pendapatan antar satu dengan lainnya, tanpa ada kesenjangan sosial yang begitu timpang antar si-kaya dan si-miskin.

Kemerdekaan Indonesia hanya bisa di capai melalui aksi spontan massa secara serentak di berbagai daerah. Bersatunya semua elemen massa akan menghancurkan pihak

penjajah, untuk kemudian merebut kekuasaan dan kemerdekaan. Kemerdekaan harus dicapai dengan paksaan dan jalan revolusioner.

Tan Malaka dengan jelas menguraikan suatu usaha dalam merebut kemerdekaan dari tangan Belanda yaitu melalui jalan revolusioner dengan melibatkan massa sebanyak-banyaknya, dan yang menjadi motor pergerakan tersebut adalah PKI. Peneliti mengkritik pola pikir Tan Malaka yang terlalu menonjolkan PKI tanpa melihat peran penting partai politik maupun golongan lain di Indonesia saat itu.

### **2.2.2. Buku Pemikiran Sutan Sjahrir**

Buku *Perjuangan Kita* dicetak pertama kali pada tahun 1945, dicetak ulang tahun 1990 oleh Yayasan 28 Oktober. Buku merupakan sebuah buku pemikiran seorang Sjahrir. Dalam buku ini, Sjahrir mengatakan bahwa sehabis Perang Dunia II, nasib Indonesia tergantung kepada imperialisme Inggris-Amerika. Bangsa Indonesia harus melakukan perubahan dengan melakukan revolusi kerakyatan dan revolusi nasional. Yang harus memimpin revolusi ini adalah orang-orang yang bebas dari kaki-tangan Jepang. Pemimpin juga harus didukung oleh balatentara yang berdisiplin dan berbenteng ideologi di dalam sebuah partai revolusioner.

Langkah pertama yang harus dilakukan di dalam keadaan sekarang adalah menyusun segala kekuatan revolusioner yang sadar dalam suatu susunan partai yang berdisiplin, dan segera memperbaiki kedudukan negara Republik Indonesia, dan mencegah menjalarnya kekacauan di antara rakyat. Secepat mungkin seluruh pemerintahan harus didemokratiser. Ini mudah dikerjakan dengan menghidupkan dan membangunkan dewan-dewan perwakilan rakyat dari desa hingga ke puncak pemerintahan. Untuk sementara pangrehpraja lama dapat diberi kedudukan sebagai

pengawas dan penasehat buat segala perubahan pemerintah di dalam daerahnya masing-masing atau ditarik ke kantor-kantor, ke polisi, agraria dan sebagainya.. Dengan sendirinya segala kekejaman serta kekurangan kemanusiaan terhadap bangsa-bangsa asing atau terhadap golongan bangsa kita sendiri akan berkurang dan hilang. Tabiat fasistis akan hilang sendiri dengan berkembangnya semangat demokrasi dan kemanusiaan. “Dengan sendirinya pula kedudukan kita terhadap dunia luar akan menjadi bertambah kuat.”

Selain itu dibahas mengenai keanekaragaman golongan di Indonesia, seperti orang-orang peranakan asing, beragama Kristen, Menado dan Ambon. Sjahrir menilai Indonesia belum memiliki sikap yang memuaskan bagi semua golongan. Kekuatan yang kita cari adalah perasaan keadilan dan kemanusiaan.

Kemenangan kapitalis pasca Perang Dunia II menyebabkan kapitalisme berkembang secara internasional. Untuk menghadapinya maka kaum buruh harus bersatu secara internasional. Sedangkan bagi kaum tani, perjuangan kemerdekaan dapat dirasakan, apabila petani tidak lagi mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah.

Dalam sebuah revolusi yang menang adalah gabungan rakyat banyak, kaum tani, kaum buruh dan pemuda. Tapi pusat kekuatan tidak berada di kaum muda tapi rakyat banyak terutama kaum buruh yang tersusun rapi dan mempunyai kesadaran. Yang harus memimpin adalah pusat politiknya sendiri, yaitu partai kerakyatan yang revolusioner. Sutan Sjahrir menghendaki sebuah wadah dalam menampung aspirasi rakyat yaitu parlemen berisikan orang-orang yang berjuang demi kesejahteraan rakyat serta jauh dari intervensi maupun kaki tangan asing. Diperlukan sebuah parlemen sebagai forum

pemersatu berbagai golongan di Indonesia agar segala pendapat atau aspirasi semua kalangan masyarakat dapat diperjuangkan tanpa melihat latar belakang suku, agama serta status sosial.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kemerdekaan sangat berat, sehingga diperlukan gerakan pemersatu seluruh rakyat, yang dihimpun oleh partai kerakyatan. Buku ini banyak menguraikan pola pikir Sjahrir yang tidak menyukai paham fasis, kewaspadaannya terhadap kemenangan kapitalisme yaitu sekutu yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia, kepeduliannya terhadap kaum petani yang selalu tertindas oleh penguasa. Oleh karena itu bagi Sjahrir di butuhkan sebuah revolusi untuk mengubah situasi dan kondisi yang telah ada sebelumnya. Tapi revolusi yang di usulkannya adalah revolusi perubahan cara berpikir rakyat bukan revolusi menggunakan senjata, beliau beranggapan bahwa kekuatan senjata Indonesia belum mampu menandingi kekuatan senjata Belanda sehingga diperlukan startegi perlawanan lain yakni menyadarkan seluruh rakyat akan ancaman penjajahan Belanda serta melakukan politik perundingan agar meraih simpati internasional.

Buku karangan Rosihan Anwar berjudul *Mengenang Sjahrir : Seorang Tokoh Pejuang Kemerdekaan Yang Tersisihkan*, dicetak pada tahun 2010. Buku ini menguraikan pemikiran Sjahrir, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh dinodai oleh paham fasis. Sikap-sikap menyanjung, meremehkan dan memaksa seseorang, haruslah dijauhkan dari kemerdekaan. Rakyat harus sadar politik, maka dengan itu akan mendapatkan pendidikan politik, sehingga menjadi landasan kuat bagi demokrasi. Struktur ekonomi Indonesia haruslah memperhatikan rakyat dan kaum buruh. Tapi kita

tidak boleh menutup masuknya modal asing, karena bisa menghidupkan perekonomian, dan tujuannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rosihan Anwar juga menyoroti betapa pentingnya peranan Sjahrir dalam perpolitikan Indonesia, Sjahrir mampu membawa Soekarno-Hatta kepada perdamaian dengan jalan melakukan diplomasi di dunia internasional, seperti Perjanjian Linggarjati. Dampak diplomasi Sjahrir membuat kedudukan Indonesia semakin kokoh dan diakui kedaulatannya oleh negara lain.

Pandangan penulis terhadap buku ini adalah Sutan Sjahrir walaupun berjiwa sosialisme tapi beliau juga seorang yang demokratis dengan menolak paham fasis dan menganggap rakyat punya hak dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Beliau juga tidak antikapitalis, bahkan menyatakan bahwa modal asing yang masuk akan memiliki dampak baik bagi masyarakat jika di kelola dengan baik. Pemikiran Sjahrir mengenai perjuangan adalah perjuangan diplomasi memegang peranan penting pada masa revolusi kemerdekaan karena melalui diplomasi, Indonesia akan meraih banyak pengakuan dari negara lain yang berdampak pada dukungan negara tersebut dalam menekan pihak Belanda yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Inilah yang membedakan perjuangan antara Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai latar belakang pemikiran maupun keputusan politik yang diambil Sutan sjahrir pada masa mempertahankan kemerdekaan. Tapi yang peneliti kritik dari buku ini adalah terlalu menonjolkan dan mengunggulkan sosok Sutan Sjahrir terutama mengenai pemikiran politiknya, padahal seorang tokoh pasti memiliki kelebihan maupun kekurangan.

Buku “*Sutan Sjahrir : Seorang Negarawan Yang Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului zamannya*”, dicetak pada tahun 2011. Buku ini ditulis oleh Rosihan Anwar. Buku ini berisi perjalanan hidup Sutan Sjahrir mulai dari kecil, dewasa sampai meninggal dunia. Buku ini berisi mengenai pemikiran politik Sutan Sjahrir yang sangat mendambakan kebebasan untuk setiap orang, yaitu individu-individu yang dapat menggunakan akal pikirannya untuk bertanggung jawab terhadap cita-cita dan tindak perbuatannya masing-masing. Impian itu mempunyai beberapa hambatan dan tantangan dalam negeri. Sjahrir sangat cemas melihat kondisi dalam negeri, dimana ada indikasi kembali tumbuhnya feodalisme lama dalam politik Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional memberi kesempatan kepada pemimpin nasional untuk menjadi raja-raja versi baru yang tetap membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Karena itu, selain revolusi nasional dibutuhkan juga revolusi sosial yang dinamakan Revolusi Kerakyatan. Revolusi Kerakyatan ini bertujuan membebaskan dan memperjuangkan kemerdekaan dan kedewasaan manusia, yaitu bebas dari penindasan serta penghinaan oleh manusia terhadap manusia.

Revolusi Nasional harus didahulukan, sebab hanya dalam alam kemerdekaan perjuangan menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kapitalisme dapat dilaksanakan. Menurut Sjahrir, Kolonialisme Belanda telah mengawinkan rasio modern dari Barat dengan feodalisme lokal dengan sangat cerdas, dan hasilnya adalah sebuah fasisme terselubung, yang menyiapkan lahan subur untuk fasisme Jepang. Kemudian partai politik sebaiknya berbentuk partai kader bukan partai massa, karena dengan partai kader, anggota mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik untuk memikul tanggung jawab politik, sedangkan partai massa

keputusan politik diserahkan ketangan pemimpin politik, dan massa rakyat memiliki ketergantungan dan tinggal dimobilisasi menurut kehendak pemimpin politik. Bersama Bung Hatta, dia mendorong sistem multipartai agar politik terhindar dari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada diri satu orang atau satu golongan. Buku ini bisa memberikan wawasan kepada penulis mengenai latar belakang kebijakan dan keputusan yang diambil oleh seorang Sutan Sjahrir.

